



KLIPING

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN KEHUMASAN

| | | | |
|------------|-------------------------|----------|-----|
| Tanggal | : Rabu, 02 Januari 2013 | Halaman | : 6 |
| Nama Media | : Jurnal Nasional | Jurnalis | : - |

MRT Harus Jalan Terus

MAKIN bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta membuat siapa pun orang yang memimpin harus bisa mengatur. Ketika penduduk makin banyak,

otomatis pergerakan manusia dalam beraktivitas sehari-hari membutuhkan transportasi. Jakarta yang hingga kini belum dapat melalui kemacetan yang kian akut dituntut bisa melayani warganya dalam menggunakan transportasi yang berbasis massal.

Kebutuhan akan adanya moda transportasi massal membuat pemerintah provinsi harus bekerja keras mewujudkannya. Joko Widodo alias Jokowi belum sampai 100 hari memimpin Jakarta tapi sudah mengeluhkan betapa sulitnya membiayai pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). Senada dengan Jokowi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa pun mengakui bahwa biaya pembangunan MRT memang berat.

Namun pasti ada jalan keluar untuk membiayai proyek tersebut. Betapapun MRT sangat besar biayanya, namun kita tidak punya pilihan lain: pembangunan MRT

harus berjalan terus. Kebutuhan warga Jakarta atas MRT sangat tinggi sehingga MRT harus diadakan.

Persoalan MRT ini tentu tak lepas dari kurangnya transparansi Pemda terdahulu kepada masyarakat. Dari mana kita tahu itu? Pada era Jokowi dan wakilnya Basuki, transparansi jelas dikedepankan. Kita bisa lihat pemda sekarang, soal MRT itu langsung diunggah ke situs Youtube sehingga publik bisa melihatnya.

Tentu, proyek MRT ini merupakan proyek bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau terwujud, maka dua pihak inilah yang sangat berjasa besar.

Bintar Rakasiwi

*Jalan Alternatif Sentul
RT 005 RW 09
Sukaraja
Kabupaten Bogor*